



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

Oleh :

SEPTIA ARINI
06151047

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

PADANG
2010



BIODATA

a) Tempat/tanggal lahir : Padang / 16 September 1988 b) Nama Orang Tua : Efimen & Gusniar c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151047 f) Tanggal Lulus : 12 Mei 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,30 i) Lama Studi : 3 tahun 8 bulan h) Alamat Orang Tua : Jl. Berlian II No. 40 Perumnas Pegambiran Rt 03 Rw XIII Padang

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat

Skripsi S1 oleh: Septia Anni Pembimbing Skripsi: Dr. H. Zulkarnaini Ras, M.Si

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan indikator otonomi dan indikator pengeluaran, selanjutnya tingkat kemiskinan diukur dengan Head Count Index. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengolahan data dengan teknik analisa GLS. Tipe data adalah panel data dan tahun penelitian dimulai dari tahun 1996-2007. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa desentralisasi fiskal berdasarkan indikator otonomi dan indikator pengeluaran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal berdasarkan indikator otonomi dan indikator pengeluaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat, jika derajat desentralisasi fiskal ditingkatkan maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang pengup dan dinyatakan lulus pada tanggal : 12 Mei 2010

Abstrak telah disetujui oleh

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Zulkarnaini Ras, M.Si	Dr. Hafizal Handra, MSoc. Sc	Drs. Masrizal, Msoc. Sc

Mengetahui
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130.812.952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Propinsi yang ada di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Dimana propinsi yang kaya akan sumber daya alam seharusnya menerima pendapatan yang lebih besar karena sumber daya yang mereka miliki telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Daerah yang kaya sumber daya alam seharusnya memperoleh hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sejak diberlakukannya sistem sentralisasi terdapat masalah dimana terjadinya ketimpangan antar propinsi atau wilayah di Indonesia serta terdapatnya masalah kemiskinan di berbagai daerah. Kegagalan sistem sentralisasi dalam mengatasi ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan menimbulkan gejala politik dimana banyak daerah yang meminta diberlakukannya otonomi daerah. Menanggapi masalah tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah.

Kebijakan desentralisasi dimulai pada bulan Januari 2001 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik terutama untuk masyarakat miskin. Dengan adanya desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah dapat mengetahui potensi, kelemahan dan masalah yang terdapat di daerahnya termasuk masalah kemiskinan. Menurut Cullis dan Jones (1992) dalam Siddik (2002) menyatakan bahwa pemerintah suatu daerah bukan hanya berperan dalam hal keuangan (anggaran), tetapi juga berperan dalam hal penentuan pilihan supaya masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.

William dan Vyasulu, Vinod (2004) menyatakan bahwa desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan prospek untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bila mengarah kepada perubahan struktur politik, meningkatkan tata kelola atau perubahan sikap pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Pada Tahun 1996 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 426,30 ribu jiwa. Pada tahun 1999 penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 601,50 ribu jiwa, berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 1996 sampai tahun 1999 dimana antara tahun tersebut desentralisasi fiskal belum dilaksanakan di Sumatera Barat.

Pengalaman dari negara sedang berkembang ditemukan adanya hubungan positif dan negatif antara desentralisasi fiskal dengan kemiskinan. Hubungan positif dimana kebijakan desentralisasi fiskal tidak mampu mengurangi kemiskinan di negara tersebut dan malah mengurangi pendapatan masyarakat miskin seperti halnya yang terjadi di negara Vietnam (penelitian yang dilakukan oleh Nguyen). Hubungan negatif ditemukan apabila kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di negara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melihat apakah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan empiris diperoleh pengaruh desentralisasi fiskal berdasarkan indikator otonomi dan indikator pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan. Indikator otonomi diukur dari PAD/TPD sedangkan indikator pengeluaran diukur dari pengeluaran pemerintah daerah / (total pengeluaran pemerintah daerah + total pengeluaran pusat di daerah). Selanjutnya kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Head count index di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 1996 sampai tahun 1998, ini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Dari tahun 2000 sampai tahun 2007 head count index di Sumatera Barat mengalami penurunan, kecuali tahun 2001 dan tahun 2006 head count index mengalami peningkatan.
2. Desentralisasi fiskal berdasarkan indikator otonomi (X_1) memberikan pengaruh yang baik terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Hasil estimasi signifikan dengan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan $p\text{-value} < 0,05$. Hasil estimasi antara indikator otonomi dengan tingkat kemiskinan diperoleh mempunyai hubungan negatif dimana 1% peningkatan indikator otonomi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,51 %. Indikator otonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 4 Kabupaten dan 5 Kota yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, Nadhif. 2006. *Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus : Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2004)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Bjornestad, Liv. 2009. *Fiscal Decentralization, Fiscal Incentives, and Pro-Poor Outcomes: Evidence from Viet Nam*. Asian Development Bank.
- BPS. 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Padang.
- BPS, 1995-2007. *Statistik Keuangan Daerah Indonesia*. Jakarta.
- BPS, 2002-2006. *Data Kemiskinan Kabupaten/kota*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Jakarta : Erlangga.
- Khasanah, Vivi Ukhwatul. 2004. *Desentralisasi Fiscal dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Antar Daerah Indonesia)*. Skripsi. Universitas Andalas.
- McCarten, William dan Vyasulu, Vinod. July6. *Democratic Decentralization and Poverty Reduction In Madhya Pradesh Searching For An Institutional Equilibrium*. www.worldbank.org.
- Musgrave, Richard A. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Nguyen Hoang-Phuong. 2008. *What is in it for the poor? Evidence from fiscal decentralization in Vietnam*. Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Rao, M Govinda. 2000. *Poverty Alleviation under Fiscal Decentralization*. Washington, D.C., World Bank Institute. www.worldbank.org.
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Siddik, Machfuz. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Jakarta. Seminar Nasional "Public Sectorscorecard. 17-18 April.